



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**TAHUN
2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Komplek Simpang Lima, Purwodadi, Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Komplek Simpang Lima, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421025, Faksimile (0292) 421025

Laman dp3akb.grobogan.go.id, Pos-el dp3akb@grobogan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 24 Februari 2026

Kepala DP3AKB
Kabupaten Grobogan,



INDARTININGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Purwodadi, 24 Februari 2026

Kepala DP3AKB
Kabupaten Grobogan,



INIARTININGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	7
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
D. Landasan Hukum	10
E. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. Pengukuran Kinerja	50
B. Capaian Kinerja Organisasi	52
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025	53
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.	72
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra	80
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar	85
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	88
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	96
C. Realisasi Anggaran	102
BAB IV PENUTUP	110
LAMPIRAN	112
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	112
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	120



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanaselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal



tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, DP3AKB mempunyai tugas pokok : melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

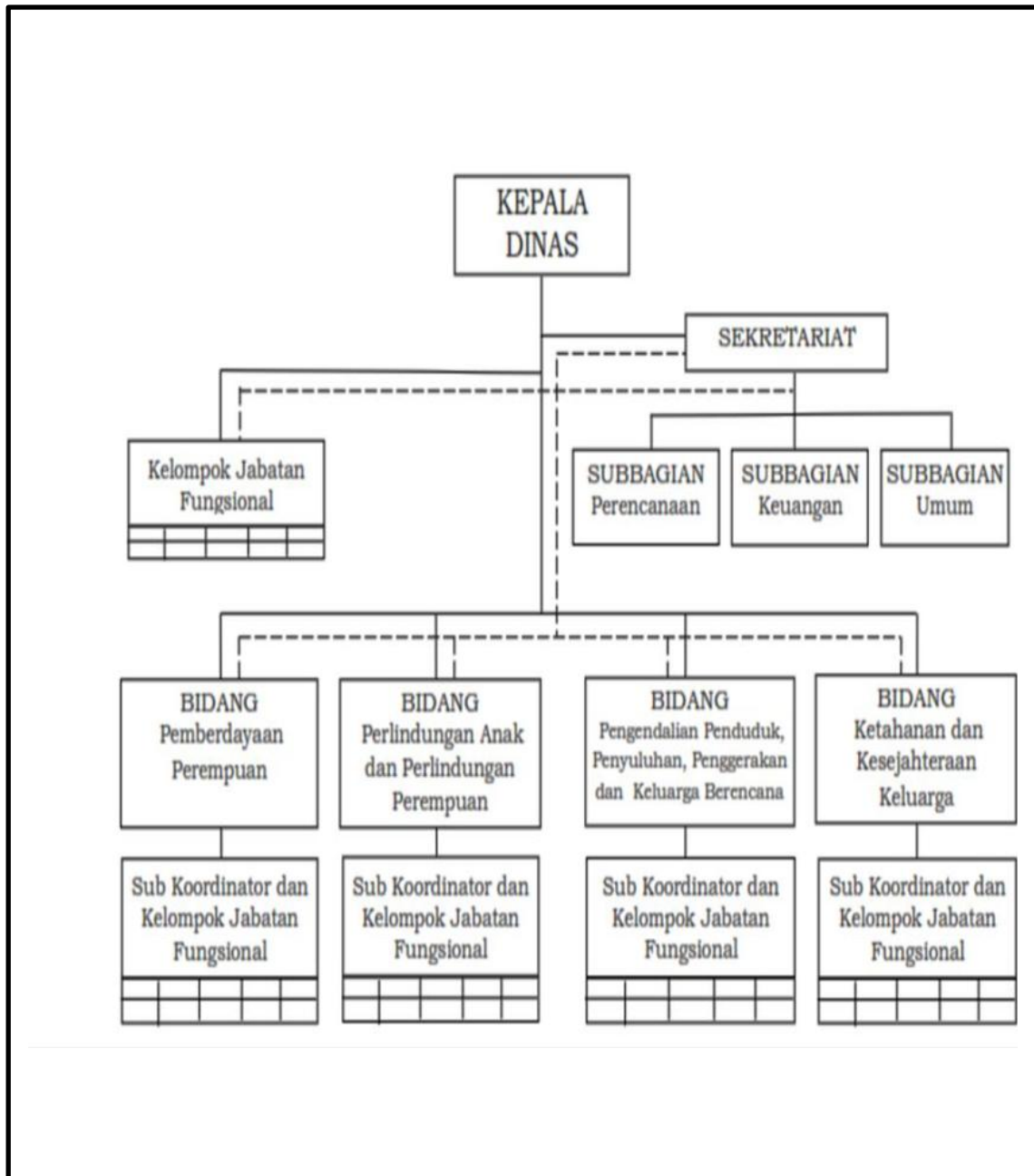
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Gambar1.1

Struktur Organisasi





C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi dunia usaha/swasta dalam penerapan PUG, dan pemenuhan hak anak;
2. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Tingginya kawin anak;
4. Belum optimalnya keberdayaan perempuan;
5. Rendahnya pencapaian akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). yang terdiri dari : MOP/MOW, IUD dan Implant. Sejumlah 66.898 akseptor sampai dengan tahun 2023 atau 13.87% dari seluruh peserta/akseptor KB di Kabupaten Grobogan, yakni 482.165 akseptor. (Bidang KB)
6. Belum optimalnya penyelenggaraan tata Kelola dan pelayanan public

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu strategisnya adalah masih rendahnya kesetaraan gender dan tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;



2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, isu strategisnya adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi



SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga



Berencana Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2024	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga			PUG	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2024	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.1	Meningkatkan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Level APE	Mad ya	Mad ya	Mad ya	Mad ya	Mad ya
				Persentase Lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan PUG	80	82	84	84	84
				Persentase Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah	51,2	51,4	51,6	51,7	52
		1.2	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perkawinan dibawah umur 19 tahun	0,070	0,069	0,067	0,064	0,061
				Tingkat capaian KLA/Indek PUHA	Mad ya	Mad ya	Mad ya	Mad ya	Mad ya
				Persentase Korban yang dilayani sesuai standart	100	100	100	100	100



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2024	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk			Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,25	2,20	2,18	2,16
		2.1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	ASFR 15-19	13	19,2	18,8	18,4	18
				Persentase Peserta KB Aktif MKJP	23	23,5	24	24,5	25
				Unmet Need	10,84	10,44	10,10	9,81	9,50
		2.2	Meningkatnya Keberdayaan Kelompok dalam Pembangunan Keluarga	Persentase Anggota Kelompok Pembangunan Keluarga Aktif (BKB;BKR;BKL;U PPKS)	82	83	84	85	86
				Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera	32,5	32	31,5	31	30,5



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2024	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.			Nilai Evaluasi SKIP PD	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD	B (76,7)	B (77,2)	B (77,7)	B (78,2)	B (79,7)
		3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	Nilai SAKIP OPD	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)
				Nilai IKM OPD	B (76,7)	B (77,2)	B (77,7)	B (78,2)	B (79,7)

Sumber : Renstra DP3AKB periode 2021-2026



4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel ..
Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan perempuan	1.1.	Capaian Level APE	Predikat	<i>Definisi :</i> Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Propinsi / Kab / Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. <i>Tujuan :</i> Untuk mempercepat perwujudan kesetaraan Gender.	Laporan hasil Tim Penilai	Kemen PPPA



		1.2.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif dlm Mewujudkan Kesenjangan Gender	%	Definisi : Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga adalah lembaga milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan. Tujuan : Untuk meningkatkan kesetaraan gender di lembaga pemerintah.	$\frac{\sum \text{Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesenjangan Gender}}{\sum \text{Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga}} \times 100$	Bidang PP
		1.3	Kontribusi Perempuan dilembaga pemerintah	%	Definisi : Peran perempuan dalam lembaga pemerintah Tujuan : Untuk mengukur keberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan.	$\frac{\sum \text{Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah}}{\sum \text{Perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah}} \times 100$	Bidang PP
2	Meningkatnya	2.1	Persentase	%	Definisi:	$\sum$ Perkawinan di bawah	Bidang



	Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak		perkawinan dibawah umur 19 tahun.		Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. <i>Tujuan :</i> Untuk memberikan perlindungan atas hak - hak bagi korban kekerasan thd perempuan dan anak.	umur 19 tahun. $\frac{\text{---}}{\sum \text{Seluruh perkawinan}} \times 100$	PP&PA / Kemenag
		2.2	Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA	Skor	Definisi: Variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA. <i>Tujuan :</i> - Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan - Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak,	Laporan hasil Tim Penilai	Kemen PPPA



					Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.		
		2.3	Persentase Korban Kekerasan yang dilayani sesuai standart.	%	Difinisi: Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. Tujuan : Untuk memberikan perlindungan atas hak – hak bagi korban kekerasan thd perempuan dan anak.	$\frac{\sum \text{Korban kekerasan terhadap perempuan yang dilayani sesuai standar.}}{\sum \text{Kekerasan terhadap Perempuan.}} \times 100$	Bidang PP&PA
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	3.1	ASFR 15-19	Angka	Difinisi : Angka Kelahiran Remaja Umur 15-	$\frac{\sum \text{Kelahiran pada kelompok umur 15-19 th.}}{\text{—————}} \times 1.000$	Bidang P4KB



	Keluarga Berencana				19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19) adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada satu periode per 1000 penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode yang sama. <i>Tujuan :</i> Analisis hasil perhitungan untuk mendapatkan pemahaman tentang tingkat kelahiran pada kelompok usia remaja perempuan (15-19 tahun).	$\frac{\sum \text{Perempuan pd kelompok umur 15-19 th.}}{\sum \text{Perempuan 15-19 th.}} \times 100$	
		3.2	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	%	<i>Definisi :</i> Peserta KB aktif MKJP adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat/cara kontrasepsi, yang terdiri dari MOW, MOP, IUD, atau implant, tanpa diselingi kehamilan. <i>Tujuan :</i> Untuk mengukur tingkat kesertaan	$\frac{\sum \text{Peserta KB Aktif MKJP}}{\sum \text{Peserta KB MKJP}} \times 100$	Bidang P4KB



					ber-KB dari seluruh Pasangan Usia Subur (PUS)		
		3.3	Unmet Need	%	Difinisi : Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Tujuan : Indikator ini dapat membantu dalam upaya pengendalian PUS yang tidak ber-KB tetapi berpotensi terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki serta mengetahui peluang terhadap tingginya angka kematian ibu, akibat kehamilan yang tidak diinginkan	$\frac{\sum \text{PUS yang Ingin Ber-KB tapi Tidak Mendapat Akses.}}{\sum \text{PUS yang Ingin Ber-KB}} \times 100$	Bidang P4KB
4	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan	4.1	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	%	Difinisi : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina	$\frac{\sum \text{Anggota Poktan Aktif}}{\sum \text{Seluruh anggota Poktan.}} \times 100$	Bidang KKK DP3AKB



	keluarga.		(BKB,BKR,BKL dan UPPKS)		Keluarga Lansia (BKL) adalah proses pendidikan dan informasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk individu yang sehat, harmonis, dan berkualitas. <i>Tujuan :</i> Indikator ini menunjukkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam pengembangan SDM Masyarakat		
		4.2	Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera	%	<i>Definisi :</i> Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. <i>Tujuan :</i>	$\frac{\sum \text{Keluarga Pra Sejahtera tingkat Kabupaten.}}{\sum \text{Seluruh Keluarga Tingkat Kabupaten.}} \times 100$	Bidang KKK DP3AKB



					Untuk mengetahui perkembangan tahapan keluarga pra sejahtera		
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	5.1	Nilai evaluasi SAKIP PD	Skor	Difinisi : Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Ta.2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja. Tujuan : Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.	Sekretariat DP3AKB



					(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka Terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.		
		5.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Skor	Difinisi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.. Tujuan : Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Metode pengolahan Nilai IKM berpedoman pada cara menghitung nilai IKM sesuai PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 yaitu dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.	Sekretariat DP3AKB

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

O	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga			PUG	Angka	9,1
		1.1	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan	Capaian Level APE	Level	Madya
				Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	%	85,75
				Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	%	61,74
		1.2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	%	0.16
				Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Level	Madya
				Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	100

2	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk			TFR	Angka	2.03
		2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	%	18
				Persentase Peserta KB Aktip MKJP	%	24.95
				Unmet Need	%	9.21
		2.2	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	%	8,5
				Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	%	31.25
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Nilai evaluasi SAKIP PD	Skor	BB (76)
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Skor	B (77.80)
		3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	Skor	BB (76)
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Skor	B (77.80)

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 15 Bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel ...

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025

O	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga		PUG	Angka	9,1
	1.1	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan	Capaian Level APE	Level	Madya
			Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	%	85,75
			Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	%	61,74
	1.2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	%	0.16
			Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Level	Madya
			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	100

2	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk		TFR	Angka	2.03
	2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	%	18
			Persentase Peserta KB Aktip MKJP	%	24.95
			Unmet Need	%	9.21
	2.2	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	%	8,5
			Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	%	31.25
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP PD	Skor	BB (76)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Skor	B (77.80)
	3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	Skor	BB (76)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Skor	B (77.80)

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target		Anggaran
1	2	3			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi publik	100	%	4,447,623,000
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100	%	2,494,561,400
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko	100	%	104,968,000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tepenuhinya kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah.	100	%	104,968,000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	104,968,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penyelenggaraan Administrasi Keuangan SPD - DP3AKB	100	%	4,447,623,000
b	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang/ bulan	4,447,623,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	6,400,000
c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	6,400,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum di SKPD	100	%	708,778,250
d	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	8,173,000
e	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	125,644,000
f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	57,069,250
g	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	8,400,000
h	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	64,440,000
i	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	445,052,000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100	%	114,322,000
j	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit	114,322,000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	%	803,086,000
k	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6,960,000
l	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	170,051,000
m	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	626,075,000

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang milik daerah	100	%	861,975,150
n	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	89,889,000
o	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	126,452,150
p	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	580,300,000
q	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	65,334,000
B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	84	%	693,405,800
8	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender	84	%	80,000,200
r	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	4	Dokumen	80,000,200
9	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG	80	%	473,405,600
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	200,000,000
s	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Organisasi	273,405,600
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang terfasilitasi dalam PUG	63	%	140,000,000
t	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Lembaga	70,000,000
u	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Dokumen	70,000,000

C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100	%	63,713,400
11	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tertindakannya Penyelenggaraan Upacara</i>	2	Kegiatan	63,713,400
v	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	63,713,400
D	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Pilah Gender yang tersedia	100	%	46,685,000
12	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase OPD yang mengumpulkan Data Pilah Gender</i>	100	%	46,685,000
w	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Dokumen	46,685,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	62.00	%	10,200,000
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten</i>	62.00	%	10,200,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	10,200,000
E	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Madya	Nilai	373,771,400
13	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Lembaga yang aktif dalam PHA</i>	78	%	280,271,400
x	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2	Organisasi	280,271,400
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Korban kekerasan yang aktif</i>	68	%	93,500,000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	63,500,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	30,000,000

	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kekerasan terhadap Anak	0	%	-
	<i>Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.</i>				-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	-
F	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya angka kelahiran	21	%	504,404,200
15	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan RR Klinik KB</i>	4	Laporan	504,404,200
z	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	279,600,000
aa	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	224,804,200
G	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif	79	%	6,012,055,800
16	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Persentase kualitas pelaksanaan program KB</i>	27	%	1,735,831,200
ab	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12	Organisasi	199,888,000
ac	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	Dokumen	174,327,000
ad	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	Laporan	286,710,000
ae	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Laporan	966,036,000
af	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	Laporan	108,870,200
17	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKP/PLKB)	Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam POKTAN	80	%	1,040,995,000
ag	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	400	orang	840,000,000
ah	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PKP/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PKP/PLKB)	12	Laporan	200,995,000

18	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	84	%	2,219,629,600
ai	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10	Laporan	80,700,000
aj	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4034	Orang	2,129,929,600
ak	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	Laporan	9,000,000
19	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	86	%	1,015,600,000
al	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	68	Kampung	1,010,200,000
am	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	5,400,000
H	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL,PPPKS).	90	%	7,652,055,000
20	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pengetahuan tentang pengolahan pangan	85	%	339,340,000
an	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25	Unit	300,000,000
ao	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Laporan	19,580,000
ap	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	10	Laporan	19,760,000
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3360	Orang	-

21	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	80	%	7,312,715,000
aq	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10	Laporan	226,715,000
ar	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	10	Laporan	3,360,000,000
as	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	10	Laporan	3696000000
at	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Organisasi	30000000
\$					22,403,443,000

sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Pada tanggal 3 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target Penetapan.	Taeget Perubahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga		PUG	Angka	9,1
	1.1	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan	Capaian Level APE	Madya	Madya
			Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	85,75	85,75
			Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	61,74	61,74
	1.2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	0.16	0.16
			Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Madya	Madya
			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100	100
2	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk		TFR	2.03	2.03
	2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	18	18
			Persentase Peserta KB Aktip MKJP	24.95	24.95
			Unmet Need	9.21	9.21
	2.2	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	85	85
			Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	31.25	31.25

3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP PD	Bb (76)	BB (76)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B(77,80)	B (77.80)
	3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (76)	BB (76)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B(77,80)	B (77.80)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel

**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi perkantoran Pemerintahan yang Baik	100	%	4,326,045,000
			100	%	2,569,871,650
			100	%	51,460,000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tepenuhinya kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	100	%	51,460,000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	1	Dokumen	51,460,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan Administrasi	100	%	4,326,045,000
b	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang/ bulan	4,326,045,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada	100	%	6,400,000
c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	6,400,000

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	530,198,000
d	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Paket	8,173,000
e	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6	Paket	119,240,000
f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	46,072,000
g	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2	Dokumen	8,400,000
h	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material	1	Paket	46,265,000
i	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	302,048,000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100	%	181,460,250
j	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	181,460,250
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	803,086,000
k	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	12	Laporan	6,960,000
l	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	170,051,000
m	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	626,075,000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	1,048,727,400
n	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	95,576,850
o	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	156,277,550
p	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	731,539,000
q	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Unit	65,334,000

B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	84	%	515,653,200
8	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender</i>	84	%	92,640,200
r	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	92,640,200
9	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG</i>	80	%	302,051,250
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	163,310,000
s	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Organisasi	138,741,250
10	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya jumlah peserta yang terfasilitasi dalam PUG</i>	63	%	120,961,750
t	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Lembaga	66,250,000
u	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	54,711,750

C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100	%	100,513,400
11	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</i>	2	Kegiatan	100,513,400
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Lembaga	-
v	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	100,513,400
D	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	100	%	40,052,000
	<i>Pengumpulan, Pengolahan</i>				
12	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan</i>	100	%	40,052,000
w	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	2	Dokumen	40,052,000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-
E	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		62.00	%	10,200,000
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Menguatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten</i>	62.00	%	10,200,000

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.00	Dokumen	10,200,000
F	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya nilai capaian KLA/Indeks PUHA	Madya	Nilai	291,788,500
13	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Lembaga dalam PHA</i>	78	%	198,288,500
x	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Mediadan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Organisasi	198,288,500
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya kualitas Lembaga Penyedia Layanan Korban kekerasan</i>	68	%	93,500,000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	63,500,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	30,000,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		0	%	
	<i>Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.</i>				
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakatbagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Orang	

G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		21	%	622,340,200
15	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah KabKota</i>	<i>Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan RR Klinik KB</i>	4	Laporan	622,340,200
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	5	Dokumen	57,816,000
z	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	282,000,000
aa	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan DataPengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	282,524,200
H	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya peserta KB aktif	79	%	5,851,688,400
16	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Meningkatnya kualitas pelaksanaan program KB</i>	27	%	1,211,280,000

ab	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.	12	Organisasi	249,520,000
ac	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	Dokumen	125,000,000
ad	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi	1	Laporan	377,340,000
ae	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Laporan	459,420,000

17	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKP/PLKB)	Meningkatnya Partisipasi keluarga dalam Poktan BKB, BKR, BKL, PIK_R dan UPPKA	80	%	1,260,000,000
ag	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	400	orang	1,260,000,000
ah	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga	Terlaksananya Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga	12	Laporan	
18	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	84	%	2,979,878,400
ai	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10	Laporan	85,500,000
aj	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4034	Orang	2,843,040,400

ak	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	Laporan	51,338,000
19	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	86	%	400,530,000
al	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB.	68	Kampung	400,530,000
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PPPKS).	90	%	7,841,949,000
20	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya pengetahuan tentang pengolahan pangan	85	%	161,851,000

an	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25	Unit	130,000,000
ao	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1	Laporan	12,651,000
ap	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Laporan	19,200,000
21	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	80	%	7,680,098,000
aq	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program	10	Laporan	221,712,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel ...

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga	PUG	9,1	9,09	99,8 %	Sangat tinggi	DP3AKB
	1.1 Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan	Capaian Level APE	Madya	Madya	100 %	Sangat tinggi	DP3AKB
		Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	85,75 %	85,71 %	99,95 %	Sangat tinggi	DP3AKB
		Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	61,74 %	61,74 %	100 %	Sangat tinggi	DP3AKB
	1.2 Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	0.016	0.032	75 %		
		Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Madya	Madya	100 %	Sangat tinggi	DP3AKB
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %	100 %	100 %	Sangat tinggi	DP3AKB
	2 Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk	TFR	2.03	2,03	100 %	Sangat tinggi	DP3AKB
	2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	18	18	100 %	Sangat tinggi	DP3AKB
		Persentase Peserta KB Aktif MKJP	24.95 %	25,67 %	102,9	Sangat tinggi	DP3AKB
		Unmet Need	9.21	8,75	105 %	Sangat tinggi	DP3AKB
	2.2 Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	85 %	85 %	100 %	Sangat tinggi	DP3AKB
		Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	31.25 %	30,48 %	102,6 %	Sangat tinggi	DP3AKB

3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP PD	Bb (76)	BB (73,5)	96,71 %	Sangat tinggi	DP3AKB
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B(77,8)	BB(85,33)	109,7 %	Sangat tinggi	DP3AKB
	3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (76)	BB (73,5)	96,71 %	Sangat tinggi	DP3AKB
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B(77,80)	BB(85,33)	109,7 %	Sangat tinggi	DP3AKB

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 (Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga) capaiannya sebesar 99,8 % dengan kategori Sangat Tinggi, dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 (Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan) mencapai 99,8 sangat tinggi % dan capaian kinerja sasaran 1.2 (Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak) mencapai ...% atau kategori Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 1 mencapai ...%, dengan kategori

Sedangkan Indikator Kinerja Tujuan 2(Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk) capaiannya sebesar 100 % dengan kategori Sangat Tinggi dengan capaian indicator kinerja sasaran 1.1 (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana) mencapai 102 % atau kategori sangat tinggi dan capaian kinerja sasaran 1.2 (Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga) mencapai 100% atau kategori sangat tinggi Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 2 mencapain101,2 %, dengan kategori sangat tinggi.

Adapun analisis capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis, diuraian sebagai berikut :

I. Tujuan 1 :

Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga.

Kinerja Tujuan Meningkatkan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga diukur dengan satu (1) indikator, indikator tersebut adalah **Indeks Pengarusutamaan Gender (Indeks PUG)**. Indikator ini dihitung dengan cara menghitung Jumlah Organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif dalam Pengarusutamaan Gender dibagi Jumlah seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Grobogan.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah OPD yang melaksanakan kebijakan PUG dalam pembangunan.

PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan. PUG bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya isu gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Anggaran responsif gender (ARG) yang di susun oleh OPD. Pada tahun 2025 jumlah OPD yang telah menyusun ARG sebanyak 29 OPD dari total 29 OPD di Kabupaten Grobogan.

Anggaran responsif gender (ARG) adalah strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pemba-ngunan nasional.

ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarus-utamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.3
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Tujuan 1

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG/PUG)	Jumlah Anggaran Responsif Gender dibagi Jumlah Anggaran APBD Non Sekertariat dikali 100

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian Tujuan Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga adalah dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Data yang ada menyebutkan bahwa pada Tahun 2025, Jumlah Anggaran Responsif Gender pada Belanja Operasional dan Modal APBD sebesar Rp 117.189.141.600,00 (seratus tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan Jumlah Seluruh

belanja Operasional dan modal di APBD sebesar Rp 1.289.201.503.915,00 (satu trilyun dua ratus delapan puluh Sembilan milyar dua ratus satu juta lima ratus tiga ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG/PUG) adalah dengan menghitung Jumlah Anggaran Responsif Gender pada Belanja Operasional dan Modal APBD dibagi Jumlah Seluruh belanja Operasional dan modal di APBD dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp}}{\text{Rp -----}} \times 100 = 9,09\%$$

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD tahun 2025 mencapai **9.09%**.

Kinerja Tujuan 1 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan I

No.	Indikator Sasaran	2025			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6
1.	Anggaran Responsif Gender (ARG/PUG)	9,1	9.09	99,8 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa ARG yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 9.09. Semakin tinggi persentase ARG, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan semakin responsif untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh.

I.1 Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan.

Kinerja Sasaran 1.1 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator tersebut adalah : Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ; Persentase Lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG); dan Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.5
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran I

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.1	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan.	Level APE	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian PPPA RI.
		Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender di bagi Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
		Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah di bagi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian kinerja sasaran 1.1 adalah dari Kementerian PPPA RI untuk Level APE dan Sistem Data Gender dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

a. Indikator Kinerja “Capaian Level APE.”

Data yang ada menyebutkan bahwa dalam Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) atau Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada

Tahun 2025 Kabupaten Grobogan mendapatkan **Kategori MADYA**.
Capaian ini sesuai dengan target kinerja tahun 2025

b. Indikator Kinerja **“Persentase Lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan PUG”**.

Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender sebanyak 30 organisasi sedangkan Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebanyak 35 organisasi.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG adalah dengan menghitung Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dibagi Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{30 \text{ organisasi}}{35 \text{ organisasi}} \times 100 = 85,71\%$$

c. Indikator Kinerja **“Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah.”**

Jumlah Perempuan yang menduduki Jabatan di Lembaga Pemerintah sebanyak 6.279 orang, sedangkan Jumlah Perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah sebanyak 10.174 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah adalah dengan menghitung Jumlah Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah Perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{6.279 \text{ orang}}{10.174 \text{ orang}} \times 100 = 85,71\%$$

Berdasarkan iatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 1.1, menunjukkan capaian yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan perempuan dinilai berhasil.

I.2 Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Capaian Kinerja Sasaran 1.2 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator tersebut adalah : Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun; Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA; dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.7
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 1.2

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.2	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan.	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	Jumlah perkawinan dibawah umur 19 tahun dibagi Jumlah seluruh umur perkawinan dikali seratus
		Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian PPPA RI.
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	Jumlah Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban dibagi Jumlah Korban Kekerasan dikali seratus.

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian sasaran Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan adalah dari Kementerian PPPA RI untuk Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA dan Bidang

Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

a. Indikator Kinerja “Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA.”

Data yang ada menyebutkan bahwa pada Tahun 2025 Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak **Kategori MADYA**. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, melalui pengintegrasian kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan pembangunan anak di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA. Penyelenggaraan KLA terintegrasi dengan seluruh sistem pembangunan di kabupaten/kota, yang berarti pembangunan di kabupaten/kota mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di:

- setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- setiap tingkatan wilayah, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Evaluasi KLA merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan KLA, yang bertujuan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Penyelenggaraan KLA tidak sekadar selesai dengan penetapan peringkat, akan tetapi evaluasi KLA justru memicu perencanaan yang lebih baik.

2. Indikator Kinerja “Persentase perkawinan dibawah umur19 tahun.”

Jumlah perkawinan dibawah umur 19 tahun sebanyak 146 Pasangan, sedangkan Jumlah Seluruh Umur Perkawinan sebanyak 790.539 pasangan.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun adalah dengan menghitung Jumlah perkawinan dibawah umur 19 tahun dibagi Jumlah seluruh umur perkawinan dikali seratus, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{146 \text{ Pasangan}}{790.539 \text{ Pasangan}} \times 100 = 0.018$$

3. Indikator Kinerja **“Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban.”**

Jumlah Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban sebanyak 49 orang, sedangkan Jumlah Korban Kekerasan sebanyak 49 orang terdiri dari 31 Laki-laki dan 65 Perempuan.

Kasus kekerasan SEKSUAL merupakan kasus terbanyak yang dialami korban. Pada tahun 2024, kasus kekerasan SEKSUAL sebanyak 38 kasus disusul Kekerasan FISIK sebanyak 33 Kasus, sedangkan sisanya terdiri dari Kasus EKSPLOITASI sebanyak 9 Kasus; Kasus SPIKIS sebanyak 8 Kasus; Kasus Penelantaran sebanyak 7 Kasus dan 1 kasus lainnya.

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh DP3AKB kepada Korban Kekerasan berupa : Layanan Hukum; Pendampingan; Mediasi; Kesehatan dan Penjangkauan Korban. Cara perhitungan terhadap capaian kinerja

Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban adalah dengan menghitung Jumlah Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban dibagi Jumlah Korban Kekerasan dikali seratus, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{96 \text{ orang}}{96 \text{ orang}} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 1.2, menunjukkan capaian

yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatkan Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dinilai berhasil.

II. Tujuan 2 : Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk.

Kinerja Tujuan 2 diukur dengan satu (1) indikator, indikator tersebut adalah **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)**.

TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa suburnya. Angka TFR yang ideal adalah 2,1 karena menunjukkan bahwa tiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2,1 anak. TFR yang berada di bawah angka 2,1 akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk, sedangkan TFR yang lebih dari 2,1 akan menyebabkan pertumbuhan penduduk.

Indikator Total Fertility Rate (TFR) dihitung dengan membagi jumlah kelahiran perempuan usia 15–49 tahun dengan jumlah perempuan usia 15–49 tahun pada periode yang sama. Berikut langkah-langkah perhitungan TFR:

1. Jumlahkan semua tingkat kesuburan menurut usia.
2. Kalikan jumlah tersebut dengan 5 (lebar interval kelompok usia) .
3. Bagikan hasil perkalian dengan 1.000 .

Pada tahun 2025, Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Grobogan sebesar 2.03 yang artinya rata-rata orang hamil di Kabupaten Grobogan 2.03 dari target 2.03 .Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.9
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Tujuan 2

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
2	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk	Total fertility Rate (TFR)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa suburnya. $TFR = ASFR \times 5$

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian Tujuan 2 Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS.

Kinerja Tujuan Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan 2

No.	Indikator Sasaran	2024			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6
2	Total Fertility Rate (TFR)	2.03	2.03	100, %	Sangat Tinggi

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa TFR yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 2.03. Jika dibandingkan dengan target TFR tahun 2025 sebesar 2.03, maka capaian TFR tahun 2025 sebesar 100%.

Target TFR tahun 2024 tercapat dengan kategori **Sangat Tinggi**. Semakin rendah persentase TFR, menunjukan bahwa Kabupaten Grobogan mampu mengendalikan jumlah penduduk, sehingga kualitas hidup penduduk Kabupaten Grobogan dapat meningkat.

II.1 Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga

Berencana

Capaian Kinerja Sasaran 2.1 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator tersebut adalah : ASFR 15-19; Persentase Peserta KB Aktip MKJP; dan Unmet Need. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.11
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 2.1

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000
		Persentase Peserta KB Aktif MKJP	Jumlah peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dibagi seluruh jumlah Peserta KB x 100
		Unmet Need	Jumlah PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi dan Ingin Anak di tunda dibagi seluruh PUS x100.

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana adalah

54

dari Bidang P4KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

1. Indikator Kinerja “ASFR 15-19”

Data yang ada menyebutkan bahwa Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 pada Tahun 2025 di Kabupaten Grobogan sebanyak 33 kelahiran, sedangkan jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada tahun 2025 sebanyak 50.828 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian Indikator **ASFR 15-19** adalah Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{385 \text{ kelahiran}}{\text{Jumlah Perempuan}} \times 1000 = 7.57$$

50.828 orang

2. Jumlah peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sebanyak 66.121 orang sedangkan Jumlah Peserta KB sebanyak 269.390 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif MKJP adalah dengan menghitung Jumlah peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dibagi seluruh jumlah Peserta KB x, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{67.409 \text{ orang}}{271.198 \text{ orang}} \times 100 = 24.85 \%$$

3. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi dan Ingin Anak di tunda sebanyak 32.907 orang, sedangkan Jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 116.951 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Unmet Need adalah dengan menghitung Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak

55

Lagi dan Ingin Anak di tunda dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{32.560 \text{ orang}}{351.373 \text{ orang}} \times 100 = 9,26 \%$$

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 2.1, menunjukkan capaian yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dinilai berhasil.

II.2 Sasaran 2.2 : Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga.

Capaian Kinerja Sasaran 2.2 diukur dengan dua (2) indikator, indikator tersebut adalah : Persentase anggota kelompok pembangunan keluarga aktif dan Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.13
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 2.2

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
2.2	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga.	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	Jumlah anggota Poktan Aktif dibagi seluruh anggota Poktan x 100
		Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Tahapan Keluarga Pra Sejahtera dibagi seluruh tahapan Keluarga Sejahtera x 100

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian sasaran meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga adalah dari Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

A. Indikator Kinerja **"Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif ."**

Data yang ada menyebutkan bahwa Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) pada Tahun 2025 sebanyak 5.008 sedangkan Jumlah seluruh Anggota Poktan sebanyak 6.073 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif adalah dengan menghitung Jumlah Anggota

Kelompok Kegiatan (Poktan) dibagi Jumlah seluruh Anggota Poktan dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{5.118 \text{ orang}}{6.73 \text{ Orang}} \times 100 = 84.27\%$$

B. Indikator Kinerja **“Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera.”**

Jumlah Tahapan Keluarga Prasejahtera sebanyak 162.266 orang, sedangkan seluruh tahapan Keluarga Sejahtera sebanyak 521.195 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera adalah dengan menghitung Jumlah Tahapan Keluarga Prasejahtera dibagi seluruh tahapan Keluarga Sejahtera dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{162.266 \text{ orang}}{521.195 \text{ orang}} \times 100 = 31.13\%$$

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 2.2, menunjukkan capaian yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatnya keberdayaan kelompok kegiatan dalam pembangunan keluarga dinilai berhasil.

III. **Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.**

Kinerja Tujuan 3 diukur dengan dua (2) indikator, indikator tersebut adalah **Nilai evaluasi SAKIP PD dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**

III.1. Sasaran 3.1. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Capaian Kinerja Sasaran 3.1 diukur dengan dua (2) indikator, indikator tersebut adalah : Nilai evaluasi SAKIP PD dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.16
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 3.1

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	Nilai evaluasi SAKIP PD	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD	

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas adalah dari Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

3.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP PD.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur. SAKIP dirancang untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. SAKIP terdiri dari : Perencanaan kinerja, Pengukuran capaian kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

SAKIP bermanfaat untuk:

1. Mengukur kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Menjadikan APBD lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

SAKIP merupakan perhitungan nilai dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar BB (73,50) dengan Predikat BAIK, atau tercapai sebesar 96,71% dari target yang direncanakan sebesar BB (76,00). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di Lingkungan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten grobogan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komponen perencanaan Kinerja.

Komponen Perencanaan Kinerja meliputi Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia termasuk bukti dukungnya. Score yang di dapat sebesar 22,5.

b. Komponen Pengukuran Kinerja pengukuran Kinerja meliputi pengukuran kinerja sudah dilaksanakan dengan baik dan secara efektif dan efisien. Nilai yang didapat sebesar 22,50 point.

c. Komponen Evaluasi Pelaporan Kinerja.

Komponen Evaluasi Pelaporan kinerja meliputi Laporan kinerja berkala, penyusunan LKJiP. Nilai yang didapat sebesar 9,75 point.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meliputi seluruh kriteria penilaian sub komponen evaluasi akuntabilitas internal internal telah dilaksanakan dan dipenuhi. Nilai seluruh komponen akuntabilitas kinerja didapat sebesar 18,75

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1 : **Nilai Evaluasi SAKIP PD** Tahun 2025 sebesar 73,5 point kategori BB

3.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengamanatkan agar penyelenggara negara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya

membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, maka diselenggarakan survey atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

Hasil survey kepuasan masyarakat yang didapat, merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Tujuan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM), adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan KB, dapat diperoleh data sebagai berikut :

- Persyaratan 3,211 point;
- Sistem, Mekanisme, Prosedur 3,079 point;
- Waktu penyelesaian 3156 point;
- Biaya/Tarif 3,947 point;
- Produk layanan 3105 point;
- Kompetensi Pelaksana 3132 point;
- Perilaku Pelaksana 3,158 point;
- Sarana dan Prasarana 2,947 poin;
- Penanganan pengaduan 3,105 point.

IKM Unit layanan 85,33 dengan predikat B (baik).

Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar B (85,33) atau tercapai sebesar 109,47% dari target yang dijanjikan sebesar B (77,80). Hal ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel ..

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)		(3)					(4)		(5)		
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga		PUG	0,96	2,14	243,75 %	0,97	9,09	937,11 %	9,1	9,09	99,8 %
	1.1	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan	Capaian Level APE	Madya	Madya	100%	Madya	Madya	100 %	Madya	Madya	100 %
			Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	72 %	77 %	107,14	84 %	85,71 %	102,4 %	85,75 %	85,71 %	99,95 %
			Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	53 %	59,6 %	112,45 %	60 %	61,72 %	102,87 %	61,74 %	61,74 %	100 %
	1.2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	0,0052	0,0017	167,31 %	0,505 %	0.01802	165 %	0.016	0.032	
			Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Madya	Madya	100 %	Madya	Madya	100 %	Madya	Madya	100 %
			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk		TFR	2,25	2,21	101,77 %	2,19	2.00	108,68 %	2.03	2,03	100 %
	2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	47	22	153,19	18,8	7,57	159,73	18	18	100 %
			Persentase Peserta KB Aktip MKJP	23,5%	24,1%	102,55 %	24,5	24,85 %	101,43 %	24.95 %	25,67 %	102,9
			Unmet Need	9,4	9,58	99,29%	9,5	9.22	102,95	9.21	8,75	105 %
	2.2	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	82%	81,41%	99,29%	84	84,7 %	100,32 %	85 %	85 %	100 %
			Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	32,5%	32,49%	100,03 %	31,50	31.13 %	101,17 %	31.25 %	30,48 %	102,6 %

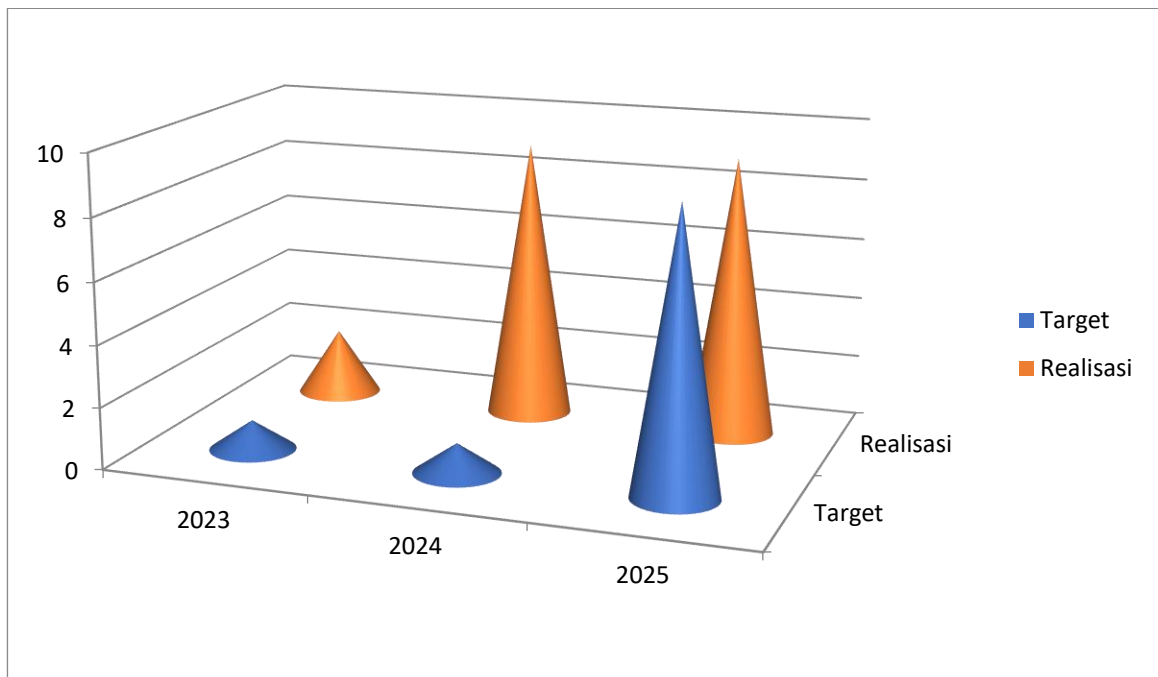
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP PD	B (68)	64,25	94,9%	BB (70)	BB (77,5)	107,14 %	Bb (76)	BB (73,5)	96,71 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B (77,20)	B (77,48)	101,2%	B(77,7)	B(77,8)	100,1	B(77,8)	BB(85,33)	109,7 %
	3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	B (68)	64,25	94,9%	BB (70)	BB (77,5)	107,14 %	BB (76)	BB (73,5)	96,71 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B (77,20)	B (77,48)	101,2%	B(77,7)	B(77,8)	100,1	B(77,80)	BB(85,33)	109,7 %

Uraian penjelasan tabel :

1. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan I **“Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,”** tahun 2025 dengan target tahun sebelumnya (2023-2025) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.

Grifik Capaian ARG / PUG Tahun 2023-2025



Berdasarkan grafik diatas, capaian Indikator Tujuan I “Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,” mengalami perubahan yang bersifat dinamis dalam 3 tahun terakhir. Indikator PUG/ARG Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebesar 2,14 dan tahun 2024 naik menjadi 9,09 % dan mengalami stagnan pada tahun 2025 menjadi 9.09 %. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender telah meningkat dan telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, baik sektor ekonomi, hukum maupun politik.

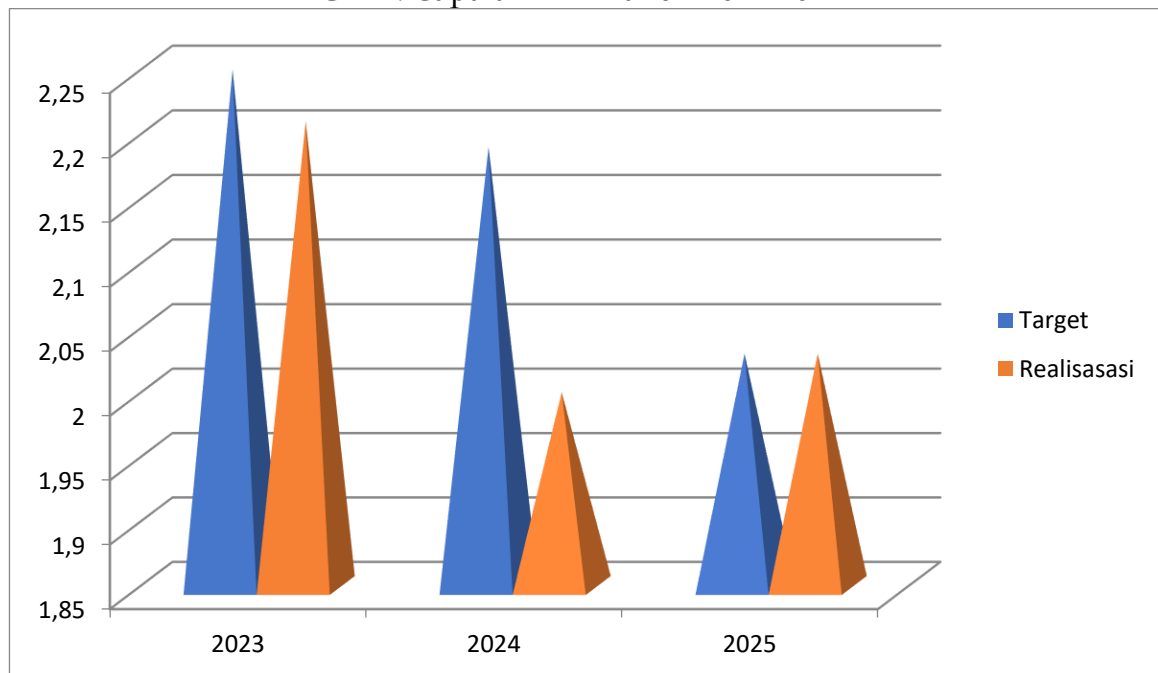
Selanjutnya berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran 1.1 *“Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan”* juga mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai tahun 2025

Dari ketiga Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja, seluruhnya menunjukkan trend positif.

Capaian Kinerja Sasaran 1.2 *“Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak,”* juga mengalami penurunan yang cukup dinamis, dimana dari ketiga indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur, hanya satu indikator yang menunjukkan trend negative / penurunan, yaitu indikator *“Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun”*. Sedangkan Indikator yang lain cenderung stagnan, karena bersifat kualitatif.

2. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 *“Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk,”* tahun 2024 dengan target tahun sebelumnya (2023-2025) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.8
Grifik Capaian TFR Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas, capaian Indikator Tujuan II “**Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk,**” mengalami perubahan yang bersifat dinamis dalam 3 tahun terakhir. Indikator *TFR* Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebesar 2.21 dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2025 sebesar 2,03. Hal ini membuktikan semakin turun *TFR* berarti Pengendalian Penduduk dan Kualitas penduduk semakin baik

Hal ini menunjukkan bahwa semakin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk di Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian sasaran 2.1 “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana*” juga mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Dari Ketiga Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja, seluruhnya menunjukkan trend positif.

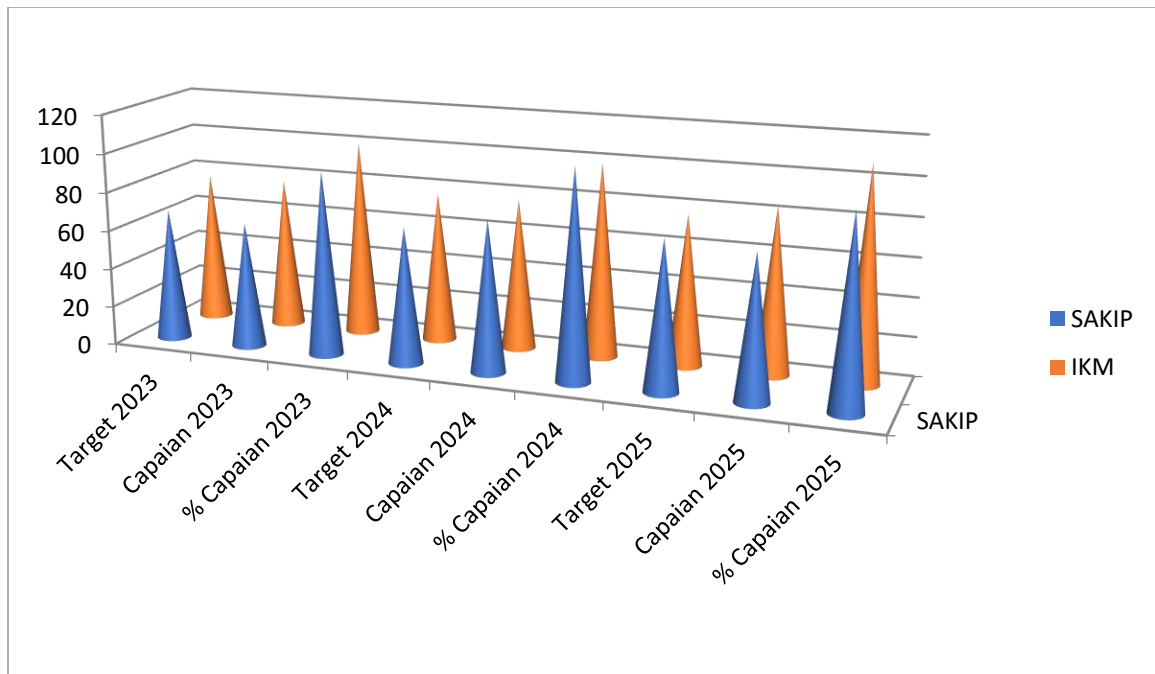
- a. Capaian Indikator *ASFR 15-19*, pada tahun 2023 sebesar 22 kelahiran per 1000 wanita kemudian pada tahun 2025 turun menjadi 18 kelahiran per 1000 wanita. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan remaja semakin berkurang
- b. Capaian Indikator *Persentase Peserta KB Aktif MKJP*, terus mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 24,1 %, dan pada tahun 2025 naik menjadi 25,67%.
- c. Capaian Indikator *Unmet Need* juga mengalami kenaikan yang cukup dinamis, dimana pada tahun 2023 sebesar 9,58 % dan pada tahun 2025 turun menjadi 8,75 %, Hal ini menyebabkan keberhasilan dalam membantu dalam upaya pengendalian PUS yang tidak ber-KB tetapi berpotensi terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki serta mengetahui peluang terhadap tingginya angka kematian ibu, akibat kehamilan yang tidak diinginkan

Capaian sasaran 2.2, *“Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga,”* juga mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Dari Kedua Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja, seluruhnya menunjukkan trend positif.

- a. Capaian Indikator *Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif*, pada tahun 2023 sebesar 8,41% kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 84.27% dan Tahun 2025 naik menjadi 85 %.
 - b. Capaian Indikator *Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera*, terus mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 32.49% dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 31.13% dan naik lagi di tahun 2025 menjadi 30,48 %. Semakin turun keluarga prasejahtera berarti keluarga sejahtera semakin meningkat.
3. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,”** tahun 2024 dengan target tahun sebelumnya (2022-2024) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.9

Grifik Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas, capaian/realisasi *Nilai SAKIP* di Kabupaten Grobogan mengalami perubahan yang bersifat dinamis dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023 capaian SAKIP Kabupaten Grobogan memperoleh nilai 64.25 point kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 75.77 point dan tahun 2025 turun menjadi 73.5. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan semakin Akuntabel.

Selanjutnya, capaian/realisasi *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD* di Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Capaian IKM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 memperoleh nilai 77.48 point kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 75.78 point dan tahun 2025 menjadi 85,33. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan semakin baik.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel ..
Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah
(Renstra)

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Target 2026	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)		(3)	4	(5)	4/5 X 100
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga		PUG	9,09	0,99	918,2 %
	1.1	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan	Capaian Level APE	Madya	Madya	100 %
			Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	85,71 %	84 %	102,04 %
			Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	61,74 %	52 %	118,73 %
	1.2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	0.032	0,0610	147,54 %
			Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Madya	Madya	100 %
			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %	100 %	100 %
2	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk		TFR	2,03	2,16	106,02%
	2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	18	18	100 %
			Persentase Peserta KB Aktip MKJP	25,67 %	25 %	102,68
			Unmet Need	8,75	9,5	107,89 %
	2.2	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	85 %	86 %	98,83 %
			Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	30,48 %	30,5 %	100,06 %

3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (73,5)	BB (73,5)	100 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	BB(85,33)	B (79,70)	107,06 %
	3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (73,5)	BB (73,5)	100 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	BB(85,33)	B (79,70)	107,06 %

Adapun analisis capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis, diuraikan sebagai berikut :

- a. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 **“Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,”** tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

Target PUG/ARG tahun 2026 sebesar 0.99 sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 9.09, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 918,18 % artinya bahwa pada tahun 2025 target Pengarusutamaan Gender telah terlampaui/tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender telah meningkat dan telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, baik sektor ekonomi, hukum maupun politik.

- a.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1 **“Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan,”** tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Level APE tahun 2025, BP3AKB Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan kategori MADYA. Sedangkan target Renstra tahun 2026 diharapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan dengan Kategori MADYA sehingga tingkat kemajuannya

sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Persentase lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan PUG pada tahun 2025 sebesar 85.71% dan telah melampaui target Renstra tahun 2026 yakni 84%, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 102,04 %.
- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2025 sebesar 61.74% dan telah melampaui target Renstra tahun 2026 yakni 52%, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 118.73%.

a.2 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2 “Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak,” tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Indikator menurunnya Persentase Perkawinan dibawah Umur 19 Tahun, pada tahun 2025 sebesar 0.032 dan telah melampaui target Renstra tahun 2025 yakni 0.0610, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 147,54 %.
- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA APE tahun 2025, BP3AKB Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan kategori MADYA. Sedangkan target Renstra tahun 2026 diharapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan dengan Kategori MADYA, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,

program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban, pada tahun 2025 sebesar 100 % dan telah sesuai target Renstra tahun 2025 yakni 100 %.

- b. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 “Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk,” tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator *TFR* adalah sebesar 2.16 sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 2.03, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 106,02% artinya bahwa Kabupaten Grobogan saat ini telah berada pada kondisi penduduk tumbuh seimbang.

- b.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana,” tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Kinerja menurunnya ASFR 15-19 pada tahun 2025 adalah 18 kelahiran per 1000 wanita sama besar dengan target akhir Renstra tahun 2026 yakni 18.00 kelahiran per 1000 wanita, Sehingga target ASFR 15-19 Tahun sudah sesuai dengan target akhir Renstra tahun 2026.
- ✓ Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Peserta KB Aktif MKJP pada tahun 2025 sebesar 25,67% lebih besar dibandingkan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 25 %, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 102,68%.
- ✓ Capaian Kinerja menurunnya Unmet Need pada tahun 2025 sebesar 8,75 lebih kecil dibanding target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 9.5, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 107,89%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mudah menjangkau akses pelayanan KB dan masih perlu peningkatan dalam kualitas pelayanan.

b.2 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.2 “Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga,” tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Anggota Kelompok Pembangunan Keluarga Aktif, pada tahun 2025 sebesar 85% lebih kecil dibanding Target Akhir Renstra Tahun 2026 yakni 86 %, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 98.83%.
- ✓ Capaian Kinerja Menurunnya Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera, pada tahun 2025 sebesar 30,48% lebih besar dari Target Akhir Renstra Tahun 2026 yakni 30.50%.

c. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,” tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

- ❖ Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator *Nilai evaluasi SAKIP PD* adalah sebesar 73.50 Point (Kategori Sangat Baik BB) sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 73,50 Point (Kategori Sangat Baik BB), sehingga tingkat kemajuannya sebesar 100 %.
- ❖ Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* adalah sebesar 79.70 Point (Kategori Baik B) sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 85,33 Point (Kategori Baik BB), sehingga tingkat kemajuannya sebesar 107,06%.

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan atau Kabupaten Tetangga,
diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja Kabupaten			Persentase capaian	
				Kabupat en	Provin si	Nasio nal	Provin si	Nasion al
(1)	(2)		(3)	4	(5)	6	7	8
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga		PUG	9,09	n/a	n/a	n/a	n/a
	1.1	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan	Capaian Level APE	Madya	Mentor	n/a	n/a	n/a
			Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	85,71 %	n/a	n/a	n/a	n/a
			Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	61,74 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	1.2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	0.032	n/a	n/a	n/a	n/a
			Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Madya	n/a	n/a	n/a	n/a
			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	2	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk		TFR	2,03	2,09	2,1	102,87
	2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	18	21	19,07	114,28 %	105,67 %
			Persentase Peserta KB Aktip MKJP	25,67 %	n/a	68,6	n/a	38 % %
			Unmet Need	8,75	5,7	7,4	46,50 %	80,13%
	2.2	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	85 %	n/a	n/a	n/a	n/a
			Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	30,48 %	n/a	n/a	n/a	n/a

3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (73,5)	65,93	n/a	114,4%	n/a
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	BB(85,33)	87,5	n/a	97,52%	n/a

	3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (73,5)	65,93	n/a	114,4%	n/a
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	BB(85,33)	87,5	n/a	97,52%	n/a

Dari tabel diatas terlihat ada beberapa Indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Jawa Tengah dan atau Capaian Kementrian PPPA dan Kemendukbangga. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator tidak di pergunakan oleh Provinsi Jawa Tengah maupun Kementrian PPPA dan Kemendukbagga sehingga capaian kinerjanya tidak dapat diperbandingkan. Hal ini bukan berarti bahwa program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kabupaten Grobogan tidak selaras dengan Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun tidak selaras dengan program Pemerintah Pusat.

a.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1 “Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan,” tahun 2025 dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Indikator meningkatnya Level APE tahun 2025, DP3AKB Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan kategori MADYA. Sedangkan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah memperoleh Kategori Mentor. Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan masih dibawah capaian kinerja Provinsi dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

d. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 “Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk,” tahun 2025 dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator *TFR* tahun 2025 sebesar 2.03, lebih baik dibandingkan capaian TFR Provinsi Jawa Tengah yakni 2.09 dan capaian indikator TFR Nasional yakni 2.10 artinya bahwa Kabupaten Grobogan saat ini telah berada pada kondisi penduduk tumbuh seimbang.

b.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana,” tahun 2025 dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Kinerja menurunnya ASFR 15-19 pada tahun 2025 adalah 18 kelahiran per 1000 wanita lebih kecil di banding capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah yakni 21.00 kelahiran per 1000 wanita dan Capaian kinerja Nasional yakni 19.07.
- ✓ Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Peserta KB Aktif MKJP pada tahun 2025 sebesar 25,67% lebih kecil dibandingkan Capaian Kinerja Nasional yakni 68.60 %.
- ✓ Capaian Kinerja menurunnya Unmet Need pada tahun 2025 sebesar 8,75 lebih besar dibanding capaian kinerja provinsi sebesar 5.7 dan capaian kinerja nasional sebesar 7.4.

e. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,” dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut : :

- ❖ Capaian Indikator *Nilai evaluasi SAKIP PD* adalah sebesar 73,5 Point (Kategori Sangat Baik BB), lebih besar dibanding Capaian Provinsi Jawa Tengah yakni 65,93 Point.

4. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel ..

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga		PUG	9,1	9,09	99,8 %		
	1.1	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan	Capaian Level APE	Madya	Madya	100 %		
			Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	85,75 %	85,71 %	99,95 %		
			Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	61,74 %	61,74 %	100 %		
	1.2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	0.016	0.032			
			Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Madya	Madya	100 %		
			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %	100 %	100 %		
2	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk		TFR	2.03	2,03	100 %		
	2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15-19	18	18	100 %		
			Persentase Peserta KB Aktip MKJP	24.95 %	25,67 %	102,9		
			Unmet Need	9.21	8,75	105 %		
	2.2	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif	85 %	85 %	100 %		
			Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	31.25 %	30,48 %	102,6 %		

3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai evaluasi SAKIP PD	Bb (76)	BB (73,5)	96,71 %		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B(77,8)	BB(85,33)	109,7 %		
	3.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (76)	BB (73,5)	96,71 %		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B(77,80)	BB(85,33)	109,7 %		

E.I Penyebab Keberhasilan.

E.I.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga.

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 2 Sasaran dengan 6 Indikator . Dari 6 indikator, seluruhnya telah menunjukkan capaian kinerja sangat Baik.

E.I.1.a Capaian Level APE sebesar 100 %;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan kebijakan;
Pada tahun 2025, DP3AKB Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pekerjaan Bimbingan Teknis Kaukus Perempuan Politok Indonesia (KPPI) dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang Politik Hukum dan Sosial.
- Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi ketahanan keluarga.

Pada tahun 2025, DP3AKB Kabupaten Grobogan telah mengoptimalkan peran Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) dalam Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Menjadikan FKKG sebagai wahana advisory / penganjur upaya - upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan oleh para pihak, dengan mendasarkan pada aturan maupun kebijakan yang sudah ada, serta membantu meningkatkan komitmen yang dapat mempercepat pencapaian kesetaraan keadilan Gender.

E.I.1.b Presentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG sebesar 99.95%;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Penguatan peran Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

E.I.1.c Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah, sebesar 100%;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.

E.I.1.d Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun, sebesar %;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Kabupaten.
- Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat.
- Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Kecamatan.

E.I.1.e Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA, sebesar 100 %;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Fasilitasi Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten.

E.I.1.f Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban, sebesar 100%.

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

E.I.2 Tujuan 2 : Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 2 Sasaran dengan 5 Indikator . Dari 5 indikator yang diukur, seluruhnya telah menunjukkan capaian kinerja sangat Baik.

E.I.2.a ASFR 15-19 sebesar 100 %;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Pembinaan Forum Genre dan PIK Remaja;
- Pemilihan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Grobogan.
- Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat.
- Penyediaan Biaya Operasional untuk pendampingan sasaran Calon Pengantin (CATIN).

E.I.2.b Persentase Peserta KB Aktip MKJP, sebesar 102,9%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan KB di Faskes.
- Penyediaan biaya pembinaan KB Pasca Persalinan.
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
- Penyelenggaraan Dukungan Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE).

E.I.2.c Unmet Need, sebesar 105%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Penyediaan Biaya Operasional Distribusi ALOKON);
- Penyediaan Biaya Operasional Penguatan Kampung KB Tingkat Kabupaten.
- Penyediaan Biaya Pembinaan dan Pembekalan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas..
- Penyelenggaraan Dukungan Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE).

E.I.2.d Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif, sebesar 100%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Penyelenggaraan orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK).
- Penyediaan Biaya Operasional Kegiatan PPKS di Balai Penyuluhan KB.

E.I.2.e Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera, sebesar 102,6%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

E.I.3 Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 1 Sasaran dengan 2 Indikator . Dari 2 indikator, seluruhnya telah menunjukkan capaian kinerja sangat Baik.

E.I.3.a Nilai evaluasi SAKIP PD, sebesar 96,71 %;

Keberhasilan dalam mencapai Indikator ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Dilaksanakannya Penyusunan RENSTRA OPD
- Penyediaan Akomodasi Rapat Monitoring dan evaluasi.

E.I.3.b Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD, sebesar 109,70 %;

Keberhasilan dalam mencapai Indikator ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai;
- Tersedianya Sumber Daya manusia yang kompeten.

E.II. Hambatan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- ❖ Hambatan yang disebabkan Faktor Sosial Budaya

Faktor Sosial Budaya adalah faktor yang sulit diubah di Kabupaten Grobogan. Pada beberapa wilayah tertanam keyakinan yang sangat kuat bahwa bila anak perempuan tidak segera menikah maka akan dianggap “perawan tua” yang menurut tata nilai di wilayah tersebut adalah sebuah gelar yang buruk.

Faktor lain terkait sosial budaya pada kehamilan remaja adalah kecenderungan orang tua yang ingin segera lepas dari tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak perempuannya.

- ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kabupaten/kota direalisasikan sesuai dengan kasus yang terlapor dan tertangani, sehingga kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang terjadi di Masyarakat tidak seluruhnya terdekksi.

❖ Tingkat efektifitas ber-KB.

Kesertaan dari Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB yang sangat rendah baik peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru masih rendah.

Pada tahun 2025, tercatat hanya sebesar 25,71 % dari total PUS sehingga tidak banyak daya ungkitnya untuk menurunkan fertilitas. Hal ini disebabkan segmentasi sasaran program belum difokuskan kepada PUS Usia Muda Paritas Rendah (PUS MUPAREN) serta peserta KB baru yang benar benar murni bukan dari peserta KB ganti cara yang dicatat sebagai peserta KB baru, disamping itu masih ada wanita melakukan perkawinan pertama di usia 16-18 tahun.

❖ Masih terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga teknis, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan masih memiliki kekurangan sumber daya manusia khususnya untuk petugas lapangan KB, petugas lapangan KB saat ini dirasa belum cukup memadai untuk bisa memenuhi seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Grobogan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya program pengendalian penduduk.

❖ Sarana dan prasarana yang belum cukup menunjang khususnya di bidang pemetaan perkiraan penduduk, sarana penunjang seperti alat dan juga komputer khusus yang ada dirasa masih kurang untuk menunjang kegiatan pemetaan sehingga jalannya kegiatan selama ini masih belum bisa optimal.

E.III. Solusi Alternatif

❖ Melaksanakan kegiatan pelayanan KB sejuta akseptor pada peringatan hari kontrasepsi dunia.

- ❖ Menindaklanjuti edaran-edaran dari pusat baik dari BKKBN pusat maupun kementerian/Lembaga lainnya. contohnya kebijakan untuk tidak memangkas anggaran pergerakan KB MKJP pada saat terjadi *refocusing* maupun *automatic adjustment*, tidak memangkas kegiatan ProPN melibatkan kelompok kegiatan dengan harapan poktan-poktan tersebut mampu memberikan dampak yang besar bagi penurunan TFR.
- ❖ Tetap melaksanakan mekanisme pengendalian program dan kegiatan melalui instrumen moneyv, dengan tujuan salah satunya adalah untuk memonitor pencapaian kinerja secara berkala agar bila terdapat tanda-tanda tidak tercapainya TFR dapat segera diambil kebijakan teknis terkait.
- ❖ Optimallisasi pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- ❖ Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data.
- ❖ Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak.
- ❖ Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (76)	BB (73,5)	96,71				0%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (77.80)	85,33	100%	6,947,376,650	6,348,114,055	91.37	7,5 %	6,947,376,650	599,262,595	Efisien
	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga	PUG	9,1	9,09	99,8 %	958,207,100	911,296,054	95.10	2,5 %	956,290,685.80	44,994,631.80	Efisien
		Capaian Level APE	Madya	Madya	100%				2,5 %			
	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG	85,75 %	85,71 %	99,95 %	656,218,600	625,164,050	95.27	2,5 %			
		Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah	61,74 %	61,74 %	100%				2,5 %			
	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak	Pemerintah Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	0.016	0.032								
		Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	Madya	Madya	100%	301,988,500	286,132,004	94.75	5%			
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100%	100%	100%				5%			
	Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk	TFR	2.03	2,03	100%	14,315,977,600	13,856,023,765	96.79	2.50%	14,315,977,600	459,953,835	Efisien
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15 - 19	18.00	18	100%				5%			
		Persentase Peserta KB Aktip MKJP	24.95	25,67	100%	6,474,028,600	6,078,289,365	93.89	5%			
		Unmet Need	9.21	8.75	105%				5%			
	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB,BKR,BKL dan UPPKS)	85.00	85	100%	7,841,949,000	7,777,734,400	99.18	0%			
		Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	31.25	30.48	103%				0%			

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA	% Capaian	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% Capaian		Menunjang / tidak Menunjang
1				2	3	4	5	6
A	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP PD	96,71 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN IKOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi publik	100	%	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100%		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100	%	Menunjang
		Nilai evaluasi SAKIP PD	96,71 %		Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko	100	%	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100%					Menunjang
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tepenuhnya kebutuhan rutin penunangan kinerja perangkat daerah.	100	%	menunjang
a				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	1	Dokumen	menunjang
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan Administrasi Keuangan SPD-DP3AKB	100	%	menunjang
b				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang/ bulan	menunjang
3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggara Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	menunjang
c				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	menunjang
4				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	menunjang
d				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Paket	menunjang
e				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6	Paket	menunjang
f				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	menunjang
g				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2	Dokumen	menunjang
h				Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhnya kebutuhan Bahan/Material	1	Paket	menunjang
i				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	menunjang
5				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100	%	menunjang
i				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	menunjang
6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	menunjang
k				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	12	Laporan	menunjang
l				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	menunjang
m				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	menunjang

7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	menunjang
n				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	menunjang
o				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	menunjang
p				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	menunjang
q				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Unit	menunjang
B	Meningkatkan kesetaraan Gender, Perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga	PUG	99,8 %	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	84	%	menunjang
	Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Level APE	100%					
		Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan	99,95 %					
		Kotribusi perempuan di lembaga pemerintah	100%					

8				Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender	84	%	menunjang
r				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	menunjang
9				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	80	%	menunjang
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	menunjang
s				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Organisasi	menunjang
10				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah peserta yang terfasilitasi dalam PUG	63	%	menunjang
t				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Lembaga	menunjang
u				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	menunjang

C				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100	%	menunjang
11				<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</i>	2	Kegiatan	menunjang
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Lembaga	menunjang
v				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	menunjang
D				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	100	%	menunjang
12				<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan</i>	100	%	menunjang
w				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	2	Dokumen	menunjang
				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	menunjang
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	menunjang
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		0	%	
				<i>Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Orang	
G	Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk	TFR	100%	Program pengendalian penduduk	Menurunnya angka kelahiran	21	%	menunjang
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana	ASFR 15 - 19	100%					menunjang
		Persentase Peserta KB Aktip MKUP	100%					menunjang
		Unmet Need	105%					menunjang
15				<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</i>	<i>Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan pelaporan FFR Klinik KB</i>	4	Laporan	menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	5	Dokumen	menunjang
z				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	menunjang

C	D	E	F	G	H	I	J	K
aa				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tertaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	menunjang
H				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya peserta KB aktif	79	%	menunjang
16				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program KB	27	%	menunjang
ab				Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Tertaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.	12	Organisasi	menunjang
ac				Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tertaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	Dokumen	menunjang
ad				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	Tertaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilok (Minilok)	1	Laporan	menunjang
ae				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	Tertaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Laporan	menunjang

C	D	E	F	G	H	I	J	K
17				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PK/PIPLKB)	Meningkatnya Partisipasi keluarga dalam Poktan BKB, BKR, BKL, PIK_R dan LPPKA	80	%	menunjang
ag				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tertaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	400	orang	menunjang
ah				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PK/PIPLKB)	Tertaksananya Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PK/PIPLKB)	12	Laporan	menunjang
18				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	84	%	menunjang
ai				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tertaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10	Laporan	menunjang
aj				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4034	Orang	menunjang
ak				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tertaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	Laporan	menunjang

19				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Ber-KB	Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	86	%	menunjang
al				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	68	Kampung	menunjang
l	Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga	Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB,BKR,BKL dan UPPKS)	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PPKS)	90	%	menunjang
		Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera	103%					menunjang
20				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya pengetahuan tentang pengolahan pangan	85	%	menunjang
an				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	25	Unit	menunjang
ao				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	1	Laporan	menunjang
ap				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	Laporan	menunjang
21				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	80	%	menunjang
aq				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL)	10	Laporan	menunjang
ar				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	10	Laporan	menunjang
as				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	10	Laporan	menunjang
at				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	1	Organisasi	menunjang

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa terdapat 10 program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dan terdapat 0 Program yang tidak menunjang. Dari22... kegiatan yang telah dilaksanakan,22 kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan terdapat 0 kegiatan yang tidak menunjang.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	REALISASI	% Capaian
1	2			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4,326,045,000	3,984,688,130	92.11
		2,569,871,650	2,312,943,125	90.00
		51,460,000	50,482,800	98.10
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,460,000	50,482,800	98.10
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)	51,460,000	50,482,800	98.10
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,326,045,000	3,984,688,130	92.11
b	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,326,045,000	3,984,688,130	92.11
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,400,000	6,019,100	94.05
c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,400,000	6,019,100	94.05
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530,198,000	475,206,175	89.63
d	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,173,000	8,172,000	99.99
e	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119,240,000	113,604,611	95.27
f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,072,000	46,072,000	100.00
g	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,400,000	8,400,000	100.00
h	Penyediaan Bahan/Material	46,265,000	45,508,202	98.36
i	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302,048,000	253,449,362	83.91
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181,460,250	177,737,050	97.95
j	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181,460,250	177,737,050	97.95
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803,086,000	660,707,846	82.27
k	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,960,000	6,101,840	87.67
l	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170,051,000	162,902,756	95.80

m	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626,075,000	491,703,250	78.54
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1,048,727,400</i>	<i>993,272,954</i>	94.71
n	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95,576,850	54,026,856	56.53
o	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156,277,550	151,605,048	97.01
p	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	731,539,000	722,307,050	98.74
q	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65,334,000	65,334,000	100.00
B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	515,653,200	490,222,150	95.07
8	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>92,640,200</i>	<i>87,115,200</i>	94.04
r	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	92,640,200	87,115,200	94.04
9	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>302,051,250</i>	<i>286,502,050</i>	94.85
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	163,310,000	155,453,000	95.19
s	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	138,741,250	131,049,050	94.46
10	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>120,961,750</i>	<i>116,604,900</i>	96.40
t	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	66,250,000	63,898,000	96.45
u	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	54,711,750	52,706,900	96.34
C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	100,513,400	97,663,400	97.16

C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100,513,400	97,663,400	97.16
11	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100,513,400	97,663,400	97.16
v	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100,513,400	97,663,400	97.16
D	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40,052,000	37,278,500	93.08
12	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	40,052,000	37,278,500	93.08
w	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40,052,000	37,278,500	93.08
E	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	10,200,000	9,505,600	93.19
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	10,200,000	9,505,600	93.19

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,200,000	9,505,600	93.19
F	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	291,788,500	276,626,404	94.80
<i>13</i>	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>198,288,500</i>	<i>190,676,690</i>	<i>96.16</i>
x	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	198,288,500	190,676,690	96.16
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>93,500,000</i>	<i>85,949,714</i>	<i>91.92</i>
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	63,500,000	59,745,714	94.09
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	26,204,000	87.35
G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	622,340,200	544,813,050	87.54

15	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah KabKota</i>	622,340,200	544,813,050	87.54
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	57,816,000	35,949,500	62.18
z	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	282,000,000	282,000,000	100.00
aa	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	282,524,200	226,863,550	80.30
H	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5,851,688,400	5,533,476,315	94.56
16	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	1,211,280,000	1,159,957,615	95.76
ab	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	249,520,000	240,888,000	96.54
ac	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125,000,000	119,853,615	95.88
ad	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	377,340,000	360,544,000	95.55
ae	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	459,420,000	438,672,000	95.48
17	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKPIPLKB)</i>	1,260,000,000	1,132,732,800	89.90
ag	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,260,000,000	1,132,732,800	89.90
18	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	2,979,878,400	2,859,527,100	95.96
ai	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	85,500,000	69,843,100	81.69
aj	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2,843,040,400	2,740,635,200	96.40

ak	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51,338,000	49,048,800	95.54
19	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>400,530,000</i>	<i>381,258,800</i>	95.19
al	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	400,530,000	381,258,800	95.19
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7,841,949,000	7,777,734,400	99.18
20	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	161,851,000	140,446,600	86.78
an	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	130,000,000	109,312,800	84.09
ao	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12,651,000	12,250,600	96.84
ap	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19,200,000	18,883,200	98.35
21	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7,680,098,000	7,637,287,800	99.44
aq	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	221,712,000	179,122,050	80.79
ar	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	3,360,000,000	3,360,000,000	100.00
		4,033,000,000	4,033,000,000	

as	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	4,032,000,000	4,032,000,000	100.00
at	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	66,386,000	66,165,750	99.67
JUMLAH		22,221,561,350	21,115,433,874	95.02

BAB IV

PENUTUP

¶



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 tujuan, 5 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan (Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga) terdiri dari indikator kinerja PUG dengan capaian kinerja sebesar 99,8 %.
- Sasaran terdiri dari Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,98 %.
- Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak terdiri indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91,7 %
- Tujuan (Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk) terdiri dari indikator kinerja TFR dengan capaian kinerja sebesar

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana terdiri indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,6 %
- Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga terdiri dari indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101,3 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.221.561.350 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 21.115.433.874, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 95,02 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 24 Februari 2026

Kepala DP3AKB

Kabupaten Grobogan,



INDARTININGSIH, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680429 199001 2 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

